

**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK
PERUSAHAAN DAN *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO
PERUSAHAAN**
(Studi empiris pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

CAHYA RUWITA

NIM. C2C008030

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Cahya Ruwita
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008030
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH
KARAKTERISTIK PERUSAHAAN
DAN *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGUNGKAPAN
RISIKO PERUSAHAAN (Studi empiris
pada perusahaan-perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia)**
Dosen Pembimbing : Puji Harto, S.E., M.si., Ph. D., Akt.

Semarang, 30 November 2012

Dosen Pembimbing,

Puji Harto, S.E., M.si., Ph. D., Akt.

NIP. 19750527 200012 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Cahya Ruwita
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008030
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH
KARAKTERISTIK PERUSAHAAN
DAN *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGUNGKAPAN
RISIKO PERUSAHAAN (Studi empiris
pada perusahaan-perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Desember 2012

Tim Penguji

1. Puji Harto, S.E., M.si., Ph. D., Akt. (.....)
2. Dr. Jaka Isgiyarta, M.si., Akt . (.....)
3. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Cahya Ruwita, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan (Studi empiris pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 30 November 2012

Yang membuat Pernyataan,

(Cahya Ruwita)
NIM : C2C008030

MOTTO DAN PESEMBAHAN

Motto

Perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hati dan penuh ucapan syukur

untuk Tuhan (Kolose 3:17&23)

Menyelesaikan semua sampai garis akhir (2 Timotius 4:7)

I can do all things through Christ who strengthens me (Philippian 4:13)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus,

seluruh keluarga, saudara, dan sahabat-sahabat

Yang selalu menjadi inspirasi luar biasa bagi pencapaian saya sejauh ini.

ABSTRACT

This research aims to get empirical proof about the factors which are influence corporate risk disclosure in manufacture firms. Corporate characteristic used in this research are size, profitability degree, leverage degree, liquidity degree, financially expertise of audit committees, frequency of audit committees meeting, public ownership structure, type of corporate ownership.

This research uses purposive sampling to carry out sample selection. There are 99 manufacture firms which are listed in BEI (Bursa Efek Indonesia) period of 2009 until 2011 become the sample in this research. Stakeholder theory is used to explain relationship inter variable. Risk disclosure in this research use content analysis based on identification of sentences act of risk disclosure in the annual report. Statistic method that used for examining the hypothesis is multiple regression analysis.

The result of this research showed that size and profitability degree are positive related significant with corporate risk disclosure. Frequency of audit committees meeting is negatively significant with corporate risk disclosure, while leverage degree, liquidity degree, financially expertise of audit committees, public ownership structure, type of corporate ownership are not significant with corporate risk disclosure.

Keywords: risk, corporate risk disclosure (CRD), stakeholder theory, leverage degree, liquidity degree, financially expertise of audit committees, frequency of audit committees meeting, public ownership structure, type of corporate ownership

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko perusahaan di perusahaan manufaktur. Karakteristik perusahaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat solvabilitas, tingkat likuiditas, keahlian komite audit, frekuensi rapat komite audit, jenis kepemilikan saham publik, dan jenis kepemilikan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dalam melakukan pemilihan sampel. Sebanyak 99 perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2009-2011 dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teori *stakeholder* digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Pengungkapan risiko dalam penelitian ini menggunakan *content analysis* didasarkan pada pengidentifikasian kalimat-kalimat pengungkapan risiko dalam laporan tahunan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan dan tingkat profitabilitas berhubungan positif signifikan dengan pengungkapan risiko perusahaan, Frekuensi rapat komite audit berhubungan negatif signifikan dengan pengungkapan risiko, sedangkan tingkat solvabilitas, tingkat likuiditas, keahlian komite audit, jenis kepemilikan saham publik, dan jenis kepemilikan perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan.

Kata Kunci : Risiko, pengungkapan risiko, teori *stakeholder*, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat solvabilitas, tingkat likuiditas, keahlian komite audit, frekuensi rapat komite audit, jenis kepemilikan saham publik, dan jenis kepemilikan perusahaan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus atas segala anugrah, berkat, kemurahan dan kasih karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO PERUSAHAAN” (Studi empiris pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011)” telah diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat banyak kendala dan hambatan, tetapi penulis sadar bahwa hambatan itu tidak akan dapat diatasi tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Ph.D., M.Si., Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Puji Harto, S.E, M.Si, Ph.D., Akt. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam proses perkuliahan dan telah banyak memberikan bimbingan, waktu, serta saran selama pembuatan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Kedua orang tuaku tercinta, Heru Prabowo dan Widjil Hudani yang selalu menjadi teladan dan memberikan semangat serta doa tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Kakakku tersayang, Hernanda Surya Wijaya dan Dewi Kusuma Sari yang selalu memberikan bantuan dan hiburan yang menyenangkan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Rizky Aulia, Ega Megarina, dan Satsya Yoga Baswara, Krishandi Bima yang selalu menemani penulis di kala suka dan duka dan membantu dalam proses menyelesaikan skripsi.
7. Evin Setyanti, Ica Fransisca, Fibrianita yang selalu mendukung dalam doa dan menyemangati dengan penuh kesabaran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar.
8. Seluruh keluarga JKI Injil Kerajaan Semarang atas semangat, bantuan dan doa yang tidak hentinya diberikan kepada penulis.
9. Seluruh keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen FEB Undip yang telah menjadi keluarga kedua penulis di kampus maupun di luar kampus.
10. Seluruh teman-teman akuntansi FEB Undip angkatan 2008
11. Teman-teman KKN 2012 Desa Kalirejo, Kledung, Temanggung.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat digunakan dalam

penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Semarang, 30 November 2012

Penulis,

Cahya Ruwita

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1.3.1 Tujuan Penelitian	14
1.3.2 Kegunaan Penelitian	15
1.4 Sistematika Penulisan	15

BAB II TELAAH PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	17
2.1.1 Teori <i>Stakeholder</i>	17
2.1.2 Manajemen Risiko	19
2.1.3 Pengungkapan Risiko	21
2.1.4 Karakteristik Perusahaan yang Mempengaruhi Pengungkapan Risiko...	24
2.1.4.1 Ukuran Perusahaan	25
2.1.4.2 Tingkat Profitabilitas	25
2.1.4.3 Tingkat Solvabilitas	26
2.1.4.4 Tingkat Likuiditas	27
2.1.4.5 <i>Corporate Governance</i>	28
2.1.4.5.1 Keahlian Komite Audit	29
2.1.4.5.2 Frekuensi Pertemuan Komite Audit	30
2.1.4.5.3 Struktur Kepemilikan Saham Publik	31
2.1.4.5.4 Jenis Kepemilikan Perusahaan	32
2.1.5 Penelitian Terdahulu.....	36
2.2 Kerangka Pemikiran.....	42
2.3 Hipotesis.....	44
2.3.1 Ukuran Perusahaan	44
2.3.2 Tingkat Profitabilitas	45
2.3.3 Tingkat Solvabilitas	46
2.3.4 Tingkat Likuiditas	44
2.3.5 Keahlian Komite Audit	48
2.3.6 Frekuensi Pertemuan Komite Audit	49
2.3.7 Struktur Kepemilikan Saham Publik	57
2.3.8 Jenis Kepemilikan Perusahaan	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	54

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	54
3.1.1 Variabel Dependen.....	54
3.1.2 Variabel Independen	58
3.1.2.1 Ukuran Perusahaan	58
3.1.2.2 Tingkat Profitabilitas	59
3.1.2.3 Tingkat Solvabilitas	59
3.1.2.4 Tingkat Likuiditas	60
3.1.2.5 Keahlian Komite Audit	60
3.1.2.6 Frekuensi Pertemuan Komite Audit	61
3.1.2.7 Struktur Kepemilikan Saham Publik	61
3.1.2.8 Jenis Kepemilikan Perusahaan	62
3.2 Populasi dan Sampel	64
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	65
3.4 Metode Pengumpulan Data	66
3.5 Metode Analisis	66
3.5.1 Analisis statistik Deskriptif	66
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	66
3.5.2.1 Uji Normalitas	67
3.5.2.1 Uji Multikolinearitas	67
3.5.2.1 Uji Heteroskedastisitas	67
3.5.2.1 Uji Autokorelasi	68
3.5.3 Analisis Regresi Berganda	68
3.5.4 Uji Hipotesis.....	69
3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R)	69
3.5.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	70
3.5.4.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	70
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	71
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	71

4.2 Statistik Deskriptif	73
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	76
4.3.1 Hasil Uji Normalitas	77
4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas	78
4.3.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas	79
4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi	80
4.4 Hasil Uji Hipotesis.....	80
4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	81
4.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	82
4.4.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	82
4.5 Pembahasan	88
4.5.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan	88
4.5.2 Pengaruh Tingkat Profitabilitas terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan	89
4.5.3 Pengaruh Tingkat Solvabilitas terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan	90
4.5.4 Pengaruh Tingkat Likuiditas terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan	91
4.5.5 Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan	92
4.5.6 Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan	93
4.5.7 Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan	94
4.5.8 Pengaruh Jenis Kepemilikan Perusahaan terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan	95
BAB V PENUTUP	97

5.1 Simpulan	97
5.2 Keterbatasan dan Saran	98
5.2.1 Keterbatasan	98
5.2.3 Saran	99
 DAFTAR PUSTAKA	 100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	39
Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel dengan Kriteria	73
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	74
Tabel 4.3 Hasil Deskriptif Skor Kelompok Risiko CRD	75
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas	77
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	78
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	80
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	81
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik F	82
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik t	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	42
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas	79

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Indeks Pengungkapan Risiko Perusahaan (CRD)	106
Lampiran B Pedoman Peraturan Indeks CRD	109
Lampiran C Tabulasi Variabel Penelitian	112
Lampiran D Hasil Analisis Statistik Deskriptif	119
Lampiran E Hasil Uji Asumsi Klasik	121
Lampiran F Hasil Uji Hipotesis	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan di Indonesia terutama yang telah *go public* atau terdaftar di pasar modal wajib untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan tahunan. Laporan tahunan menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik (pemegang saham) atas sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya (SFAC no.1 paragraf 50, dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Lebih lanjut dinyatakan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan yang terdapat dalam SFAC No.1 paragraf 34 bahwa pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan yang serupa secara rasional. Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa informasi yang diberikan selain sebagai pertanggungjawaban manajemen, informasi harus dapat mendukung *stakeholder* dalam mengambil keputusan atau mengantisipasi keadaan ekonomi.

Laporan tahunan terdiri dari komponen keuangan maupun non keuangan karena komponen keuangan saja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* (Maines *et al.*, 2002 dalam Amran, Rosli, dan Hassan 2009). Komponen non keuangan menyediakan informasi tambahan bagi *stakeholder*, termasuk terkait dengan risiko perusahaan. Informasi mengenai sifat dan tingkat

risiko yang timbul dari instrumen keuangan dapat berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif (PSAK No. 60 Revisi 2010). Dalam pengungkapan kualitatif entitas harus mengungkapkan eksposur risiko, bagaimana risiko timbul, tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko serta metode pengungkapan risiko. Sedangkan dalam pengungkapan kuantitatif, entitas disyaratkan untuk mengungkapkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar termasuk membuat analisa sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar.

Informasi risiko menarik perhatian *stakeholder* terkait peristiwa skandal akuntansi yang terjadi pada sejumlah perusahaan dan terjadinya krisis finansial global tahun 2008. Peristiwa tersebut membuat *stakeholder* ragu atas informasi keuangan yang diberikan perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk tidak hanya mengungkapkan informasi terkait keuangan perusahaan saja. Tuntutan informasi baik keuangan maupun non keuangan membuat perusahaan untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada *stakeholder*. Keterbukaan perusahaan bergantung pada kualitas informasi yang diberikan perusahaan. Kualitas informasi dicerminkan dalam luasnya pengungkapan perusahaan dalam laporan tahunan terkait informasi keuangan. Demikian juga untuk informasi risiko, kualitas informasi risiko dapat dilihat dalam pengungkapan perusahaan yaitu pengungkapan risiko perusahaan (*Corporate Risk Disclosure*).

Corporate Risk Disclosure (CRD) merupakan penggabungan laporan keuangan dari keadaan yang umum, spesifik, dan potensial, yang dapat menyebabkan nilai aset dan atau kewajiban berfluktuasi menurun atau sebaliknya (Hassan, 2008). Pengertian tersebut menunjukkan kondisi perusahaan terkait

keputusan *stakeholder* atas informasi risiko yang dijelaskan sebelumnya. Hal itu sesuai dengan arti pengungkapan yang dikaitkan dengan laporan keuangan, bahwa pengungkapan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktifitas suatu usaha (Ghozali dan Chariri, 2007). Pengungkapan risiko perusahaan menunjukkan kondisi perusahaan terkait dengan risiko yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi sehingga mempengaruhi keputusan *stakeholder*. Hal tersebut sesuai dengan pengertian *disclosure* jika dikaitkan dengan data, bahwa *disclosure* memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan, yaitu *stakeholder* (Ghozali dan Chariri, 2007).

Kualitas dan luas pengungkapan di setiap perusahaan dipengaruhi oleh biaya dan manfaat dari pengungkapan. Manajer akan mengungkapkan informasi lebih baik jika manfaat yang diperoleh dari pengungkapan tersebut lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Tetapi jika manfaat yang diberikan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, perusahaan akan cenderung mengurangi tingkat luas pengungkapan risiko. Perbedaan biaya dan manfaat dikarenakan adanya perbedaan risiko dan karakteristik yang dimiliki oleh setiap sektor industri tersebut (Hadi dan Sabeni, 2002). Pernyataan ini didukung oleh Almilia dan Retrinasari (2007) yang menyatakan bahwa perbandingan biaya dan manfaat akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik tertentu dari perusahaan yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik perusahaan adalah faktor yang menyebabkan kualitas dan luas pengungkapan berbeda di setiap perusahaan.

Dalam konteks laporan keuangan, penentuan karakteristik perusahaan dapat ditetapkan dengan menggunakan tiga kategori, yaitu: karakteristik yang berhubungan dengan struktur (*structure*), kinerja (*performance*), dan pasar (*market*) (Subiyantoro, 1996). Struktur meliputi ukuran (*size*) perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban atau *leverage* (solvabilitas perusahaan). Kemudian kinerja mencakup kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan (likuiditas perusahaan) dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas perusahaan). Selanjutnya karakteristik yang berhubungan dengan pasar, ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat kualitatif, misalnya tipe industri dan tipe auditor.

Karakteristik perusahaan lain yang berperan penting adalah *corporate governance*. Menurut *Organization for Economic Corporation and Development / OECD* (2004), *corporate governance* adalah suatu struktur untuk menetapkan tujuan perusahaan, saran untuk mencapai tujuan tersebut serta untuk menentukan pengawasan atas kinerja perusahaan. *Corporate governance* juga sering kali dinyatakan sebagai suatu mekanisme untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh manajemen, saat terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian (Parulian, 2007). Kesuksesan ataupun kegagalan yang terjadi pada perusahaan tergantung pada strategi *corporate governance* yang diterapkan perusahaan tersebut. Beberapa karakteristik yang termasuk dalam *corporate governance* diantaranya adalah pemegang saham, dewan komisaris, dewan

direksi, komite audit, komite manajemen risiko, anggota dewan direksi, anggota dewan komisaris, etika perusahaan, dan tanggung jawab sosial.

Meskipun banyak penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan risiko yang menguji hubungan antara level pengungkapan dengan karakteristik khusus perusahaan, beberapa tahun ini terlihat suatu ketertarikan untuk menguji dan meningkatkan pengungkapan risiko perusahaan (Hasssan, 2009). Pengungkapan risiko mulai menjadi perhatian ketika *Institute of Chartered Accountants in England and Wales* (ICAEW) mempublikasikan sebuah *discussion paper* pada tahun 1998. ICAEW berpendapat bahwa pengungkapan risiko perusahaan adalah dasar dari praktik akuntansi dan investasi, sehingga direksi sebaiknya menyediakan informasi manajemen risiko pada laporan tahunan untuk memfasilitasi para *stakeholder* membuat keputusan (Linsey dan Shrives, 2006 dalam Amran *et al*, 2009).

Beberapa peneliti berpendapat bahwa CRD menjadi sebuah bagian dari pengungkapan risiko yang penting karena menyediakan transparansi yang lebih besar dan meningkatkan kepercayaan investor (Hassan, 2009). Menurut Ghazali dan Chariri (2007), pengungkapan (*disclosure*) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Hal tersebut berarti tidak ada informasi yang tidak disampaikan pada investor. Jadi *disclosure* adalah pengungkapan informasi yang merupakan cara untuk mewujudkan transparansi sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Lebih lanjut dijelaskan agar tujuan transparansi tersebut tercapai, informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi

(Ghozali dan Chariri, 2007). Informasi risiko dapat membantu investor dalam pembuatan keputusan investasi yang rasional (Kieso dan Weygandt, 1995 dalam Aljifri dan Hussainey, 2007). Jika kepercayaan investor meningkat, maka investor akan lebih mudah dan yakin dalam membuat keputusan investasi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan SFAC No.1 dalam Ghozali dan Chariri (2007) yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor potensial dan pengguna lainnya dalam rangka pengambilan keputusan investasi rasional, kredit, dan keputusan jenis lainnya.

Menurut Bujaki *et al.*, dalam Aljifri dan Hussainey (2007), pengungkapan risiko berperan dalam mengurangi asimetri informasi antara manajer dan investor. Investor sebagai prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Hal tersebut membuat manajer akan memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan investor sehingga berpotensi menyebabkan konflik keputusan. Asimetri informasi akan membuat manajer melakukan hal yang diinginkannya dan menyembunyikan informasi yang tidak diketahui investor. Asimetri informasi juga menyebabkan adanya biaya agensi yaitu biaya pengawasan oleh prinsipal, biaya perikatan oleh agen, dan kerugian residual. Kerugian residual adalah pengurangan kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh prinsipal akibat perbedaan keputusan tersebut. Jika pengungkapan risiko lebih luas sehingga asimetri informasi berkurang, biaya – biaya agensi tersebut dapat ditekan. Selain itu, investor dan kreditur dapat lebih memahami risiko investasi sehingga *cost of equity capital* (biaya modal) semakin rendah.

Pentingnya pengungkapan risiko diatur oleh beberapa badan regulator di Indonesia. Aturan-aturan yang dikeluarkan mensyaratkan perusahaan melaporkan informasi risikonya dalam laporan tahunan perusahaan. PSAK 50 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, menyatakan bahwa pengungkapan yang dipersyaratkan adalah yang menyediakan informasi untuk membantu *stakeholder* dalam menilai tingkat risiko yang terkait dengan instrumen keuangan. Aturan tersebut kemudian digantikan oleh PSAK 60 (revisi 2010). PSAK 60 mengatur ketentuan atas pengungkapan instrumen keuangan dalam 2 kategori, yaitu informasi mengenai signifikansi instrumen keuangan untuk posisi dan kinerja keuangan; dan informasi mengenai sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan.

Aturan lain tentang pengungkapan dikeluarkan dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, menyebutkan bahwa emiten diwajibkan untuk menyertakan penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut. Risiko-risiko itu misalnya, risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah. Peraturan tersebut diperbaharui dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-40/BL/2007 yang berisi tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi

Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan telah dilakukan di berbagai negara. Penelitian tentang risiko, yang berhubungan dengan pengungkapan telah dilakukan di negara-negara Barat dan Eropa, seperti UK, Italy, Canada, USA, Australia, dan Portugal (Hassan, 2009). Linsley dan Shrivies (2006) meneliti tentang pengungkapan risiko dalam laporan tahunan perusahaan di UK. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan hubungan signifikan antara ukuran perusahaan dan tingkat risiko lingkungan terhadap luas pengungkapan risiko. Hassan (2009) menguji karakteristik khusus perusahaan dalam perusahaan-perusahaan di United Arab Emirates (UAE) terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa ukuran perusahaan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan, sedangkan level risiko dan tipe industri perusahaan berhubungan signifikan. Amran *et al.*, (2009) meneliti pengungkapan manajemen risiko dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Malaysia menemukan hubungan signifikan antara ukuran perusahaan dan jenis perusahaan dengan pengungkapan risiko. Sedangkan diversifikasi (produk maupun geografis) dan tingkat *leverage* tidak berhubungan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan risiko.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengungkapan risiko merupakan topik yang masih sedikit dibahas. Penelitian yang dilakukan oleh Taures (2010) menemukan bahwa ukuran perusahaan dan jenis perusahaan berhubungan positif terhadap pengungkapan risiko, sedangkan diversifikasi produk dan geografis,

tingkat leverage, serta tingkat profitabilitas tidak berpengaruh signifikan. Penelitian yang lain hanya berfokus pada pengungkapan secara umum, yaitu pengungkapan sukarela. Almalia dan Retrinasari (2007) misalnya, menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan tahunan yang terdaftar di BEJ. Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan oleh penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007) bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan tipe kepemilikan perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan dengan luas *voluntary disclosure*.

Penelitian lebih lanjut mengenai pengungkapan risiko di Indonesia diperlukan mengingat pentingnya pengungkapan risiko, kurangnya penelitian mengenai pengungkapan risiko, ketidakkonsistenan penelitian terdahulu dan kebutuhan informasi mengenai risiko yang diperlukan oleh *stakeholder*. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2009) dengan objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan pengelola sumber daya yang melakukan kegiatan transaksi ekonomi dengan banyak pihak yaitu *stakeholder* (pemasok, kreditur, konsumen dan investor). Perusahaan yang aktivitas ekonominya berhubungan dengan banyak pihak akan menimbulkan banyak risiko sehingga diharapkan berhubungan dengan pengungkapan risiko yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hassan (2009). Penelitian terdahulu menggunakan sampel penelitian perusahaan-perusahaan keuangan dan non keuangan di United Arab

Emirates, sedangkan penelitian ini mengambil sampel perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Beberapa variabel independen juga ditambahkan seperti tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, keahlian anggota komite audit, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan saham publik.

Penghapusan karakteristik jenis perusahaan karena sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sehingga tidak ada perbedaan jenis perusahaan. Jenis perusahaan diganti dengan jenis kepemilikan perusahaan yang dibagi menjadi PMDN, PMA, perusahaan keluarga, dan BUMN. Kemudian penghapusan variabel cadangan perusahaan dikarenakan tidak adanya peraturan wajib yang mengatur mengenai cadangan pada perusahaan manufaktur. Penghapusan variabel cadangan perusahaan juga didasarkan pada hasil penelitian oleh Hassan (2009) yang telah meneliti variabel tersebut dan menemukan tidak adanya hubungan yang signifikan antara cadangan perusahaan dengan pengungkapan risiko.

Karakteristik lain yang mungkin berpengaruh dan ditambahkan penelitian ini adalah tingkat profitabilitas. Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Aljifri dan Hussainey (2007) yang menemukan hubungan yang positif antara tingkat profitabilitas dengan luas pengungkapan informasi *forward-looking* dalam laporan tahunan perusahaan di UAE. Semakin tinggi *profit margin* maka akan semakin tinggi pengungkapannya (Almilia dan Retrinasari, 2007). *Profit margin* yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih terinci, sebab mereka ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas

perusahaan dan kompensasi terhadap manajemen (Shingvi dan Desai, 1971 dalam Almilia dan Retrinasari, 2007).

Karakteristik keuangan perusahaan lain yang ditambahkan dalam penelitian ini adalah tingkat likuiditas. Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Alamalia dan Retrinasari (2007) yang menemukan hubungan yang positif antara tingkat likuiditas dengan kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan. Semakin tinggi *current ratio* maka akan semakin tinggi pengungkapannya (Almilia dan Retrinasari, 2007). *Current ratio* yang tinggi dipandang sebagai ukuran kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan sehingga diikuti dengan peningkatan risiko dan akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih luas.

Variabel struktur kepemilikan publik ditambahkan dalam penelitian ini. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik maka semakin besar tekanan yang dihadapi perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak dalam laporan tahunannya. Hal ini dikarenakan dengan semakin besar porsi kepemilikan publik, maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, sehingga semakin banyak pula butir-butir informasi yang mendetail yang dituntut untuk dibuka dalam laporan tahunan. Variabel struktur kepemilikan publik merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian yang dilakukan Cerf dan Singhvi (dalam Hardhina Rosmasita, 2007)

Kemudian variabel keahlian komite audit dan frekuensi rapat komite audit juga ditambahkan dalam penelitian ini. Penambahan variabel ini didasarkan pada

penelitian Yatim (2009) yang menemukan hubungan signifikan kedua variabel ini terhadap pembentukan manajemen risiko perusahaan (RMC). Anggota komite audit dengan latar belakang pendidikan akuntansi memiliki kemampuan yang memadai untuk meningkatkan efektifitasnya sehingga mampu mengidentifikasi risiko yang ada di dalam perusahaan (Wulandari, 2012). Kemudian frekuensi rapat komite audit meningkatkan komunikasi yang baik di dalam komite dan mampu membantu perusahaan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi tingkat risiko (Tao dan Hutchinson, 2011). Kedua variabel ini yang telah ditemukan berhubungan positif dengan pembentukan manajemen risiko, sehingga diharapkan mendorong perusahaan mengungkapkan informasi risiko yang lebih besar kepada publik.

Pemilihan tahun 2009 - 2011 memiliki tujuan mengetahui pengungkapan risiko yang dibuat perusahaan setelah krisis finansial global 2008. Di samping itu, tahun tersebut dipilih karena menggambarkan profil perusahaan terkini. Penelitian ini menguji kembali karakteristik perusahaan yaitu ukuran perusahaan, rasio keuangan perusahaan (tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas), dan *corporate governance* (kepemilikan saham publik, jenis kepemilikan perusahaan, keahlian komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit) yang mempengaruhi pengungkapan risiko.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik pengungkapan risiko yang dilakukan oleh

perusahaan–perusahaan di Indonesia berbeda – beda, baik dari segi format, tempat, maupun luasnya. Hal ini dikarenakan karakteristik perusahaan yang mungkin mempengaruhi praktik pengungkapan risiko perusahaan, diantaranya ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat solvabilitas, tingkat likuiditas, keahlian komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, struktur kepemilikan saham publik, dan jenis kepemilikan perusahaan. Maka di dalam masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan?
2. Apakah tingkat profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan?
3. Apakah tingkat solvabilitas memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan?
4. Apakah tingkat likuiditas memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan?
5. Apakah keahlian komite audit memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan?
6. Apakah frekuensi pertemuan komite audit memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan?
7. Apakah struktur kepemilikan saham publik memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan?
8. Apakah jenis kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bagian ini menjelaskan tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh karakteristik khusus perusahaan terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Tujuan dan kegunaannya adalah:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan.
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat solvabilitas terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan.
4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat likuiditas terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan.
5. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh keahlian komite audit terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan.
6. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan.
7. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh struktur kepemilikan saham publik terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan.

8. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh jenis kepemilikan perusahaan terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan atau manfaat, antara lain:

1. Bagi Akademik

Memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan gagasan untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan risiko.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan pemahaman lebih tentang pengungkapan risiko sehingga membantu memperbaiki praktek pengungkapan risiko dan meningkatkan kualitas pengungkapan risiko perusahaan.

3. Bagi Investor

Memberikan informasi lain yaitu informasi kualitatif kepada investor maupun kreditor selain informasi yang bersifat kuantitatif untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit kepada perusahaan yang memiliki pelaporan risiko.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai isi penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori *stakeholder*, manajemen risiko, pengungkapan risiko, dan karakteristik perusahaan yang mempengaruhi luas pengungkapan risiko.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Bab ini meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan yang didasarkan atas hasil penelitian data.

BAB V: PENUTUP

Bab ini meliputi simpulan, keterbatasan, saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Landasan teori memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu luas pengungkapan risiko perusahaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori *stakeholder*, manajemen risiko, pengungkapan risiko, dan karakteristik perusahaan yang mempengaruhi luas pengungkapan risiko.

Sedangkan penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan pengungkapan risiko perusahaan yang digunakan untuk mendukung teori yang dipakai dan digunakan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah.

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Stakeholder atau pemangku kepentingan perusahaan seringkali didefinisikan hanya sebatas pemegang saham. Friedman (1962) menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya sehingga pada awalnya pemegang saham dipandang sebagai satu-satunya *stakeholder* (Ghozali dan Chariri, 2007). Namun demikian, pandangan tersebut mulai berubah. Menurut Freeman, 1984 dalam Amran *et al.*, (2009) *stakeholder* adalah kelompok atau individu yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Jadi *Stakeholder* bukan hanya pemegang saham tetapi juga termasuk kelompok atau individu lain yang lebih luas,

diantaranya kreditur, karyawan, konsumen, pemerintah, pemasok, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (Ghozali dan Chariri, 2007). Manfaat tersebut akan mendukung kepentingan *stakeholder*, sedangkan para *stakeholder* memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Perbedaan kepentingan tersebut akan menimbulkan konflik yang mungkin bisa mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Karena pada dasarnya, *stakeholder theory* adalah mengenai hubungan yang dinamis dan kompleks antara perusahaan dengan lingkungan di sekitarnya, yaitu *stakeholder* (Gray *et al.*, 1996 dalam Amran *et al.*, 2009). Untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut, perusahaan berupaya memikirkan cara yang strategis dalam menghadapinya. Ulman (1985) mengatakan bahwa organisasi akan memilih *stakeholder* yang dipandang penting, dan mengambil tindakan yang dapat mengendalikan hubungan harmonis antara perusahaan dengan *stakeholdernya* (Ghozali dan Chariri, 2007). Lebih lanjut dikatakan bahwa ketika *stakeholder* menyediakan dukungan terhadap perusahaan dengan mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara memuaskan kepentingan para *stakeholdernya* (Ulman, 1985 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Pengungkapan yang lebih luas yaitu dengan meningkatkan penyediaan informasi merupakan salah satu cara untuk mencapai kepuasan *stakeholder*.

Salah satu kebutuhan vital *stakeholder* adalah informasi akan risiko atas kondisi perusahaan. Informasi akan risiko disampaikan perusahaan melalui pengungkapan risiko. Pengungkapan risiko sebagai salah satu praktik pengungkapan perusahaan merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para *stakeholdernya* (Taures, 2010). Jika informasi risiko dapat dipahami *stakeholder* melalui pengungkapan risiko, diharapkan informasi tersebut akan memuaskan keinginan *stakeholder*. Kepuasan *stakeholder* akan berdampak dalam pengendalian sumber ekonomi sehingga menyediakan dukungan terhadap perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan memiliki tingkat risiko yang tinggi akan mengungkap kebenaran dan penjelasan mengenai apa yang terjadi dalam perusahaan (Amran *et al.*, 2009). Semakin tinggi tingkat risiko perusahaan, semakin banyak pula pengungkapan risiko yang harus dilakukan perusahaan, karena manajemen perlu menjelaskan penyebab risiko, dampak yang ditimbulkan, serta cara perusahaan mengelola risiko (Linsley dan Shrides, 2006). Semakin banyak informasi yang diungkapkan akan dipahami *stakeholder* sehingga perusahaan akan dianggap risikonya menjadi berkurang. Hal tersebut akan berdampak pada kepuasan *stakeholder*. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengungkapan risiko berpengaruh penting pada kepuasan *stakeholder*.

2.1.2 Manajemen Risiko

Risiko merupakan situasi ketika terdapat ketidakpastian mengenai dampak yang terjadi, baik keuntungan maupun kerugian (ICAEW, 2002). Jadi risiko tidak

hanya hal yang merugikan perusahaan. Risiko yang dihadapi perusahaan dibagi menjadi risiko keuangan, risiko operasi, risiko teknologi, risiko integritas, dan risiko strategi (Linsley dan Shrives, 2006). Risiko keuangan merupakan risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan perusahaan seperti risiko pasar, kredit, likuiditas, serta tingkat bunga atas arus kas. Risiko operasi berkaitan dengan kepuasan pelanggan, pengembangan produk, pencarian sumber daya, kegagalan produk, dan lingkungan. Risiko kekuasaan berkaitan dengan manajemen dan kepemimpinan, komunikasi, intensif kinerja. Risiko teknologi berkaitan dengan akses, ketersediaan, dan infrastruktur. Risiko integritas berkaitan dengan kecurangan manajemen dan karyawan, tindakan ilegal, dan reputasi. Sedangkan risiko strategi berkaitan dengan pengamatan lingkungan, industri, portofolio bisnis, pesaing, peraturan, politik dan kekuasaan.

Tidak ada standar khusus bagaimana mengatur risiko yang dihadapi perusahaan (ICAEW, 2002). Namun demikian, semua elemen yang terdapat dalam risiko harus dapat dikelola oleh perusahaan. Pengelolaan risiko dapat mempengaruhi tujuan perusahaan. Risiko harus dapat dikelola dengan baik sehingga risiko yang ada tidak berdampak buruk pada perusahaan, tetapi dapat membantu perusahaan dalam memahami ketidakpastian kondisi ekonomi. Pengelolaan atas risiko yang dihadapi perusahaan biasa disebut dengan manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah proses dan metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola risikonya (atau menangkap kesempatan) yang berhubungan dengan pencapaian tujuan-tujuan perusahaan (Amran *et al.*, 2009).

Manajemen risiko yang dipilih setiap perusahaan umumnya berbeda satu sama lain, walaupun perusahaan-perusahaan tersebut dalam industri yang sejenis yang mungkin menghadapi risiko yang serupa. Hal ini dikarenakan manajemen yang berbeda memiliki strategi pengelolaan, toleransi terhadap risiko, dan tujuan yang berbeda pula, sehingga penting bagi investor untuk lebih memperhatikan kunci risiko bisnis dan bagaimana setiap risiko dikelola oleh perusahaan. Kerangka kerja manajemen risiko melibatkan proses-proses sebagai berikut (Lajili dan Zeghal, 2005 dalam Amran *et al.*, 2009):

1. Mengidentifikasi, mengukur, dan menilai tipe atau jenis risiko yang mungkin dihadapi perusahaan,
2. Memilih metode atau tindakan strategis yang tepat untuk mengontrol risiko, termasuk menentukan apakah dengan menghindari risiko, mengurangi risiko, atau memindahkan risiko ke pihak lain,
3. Memonitor dan mengawasi semua tindakan yang direncanakan untuk mengatasi risiko yang mungkin dihadapi.

2.1.3 Pengungkapan Risiko

Pengungkapan merupakan penyampaian informasi yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Pengungkapan memiliki tiga konsep, yaitu pengungkapan yang cukup (*adequate*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*) (Ghozali dan Chariri, 2007). Selanjutnya dijelaskan pengungkapan yang cukup berarti mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Pengungkapan secara wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat

memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan, sedangkan pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya menyajikan semua informasi yang relevan (Ghozali dan Chariri, 2007). Ketentuan atas pengungkapan informasi diatur dalam PSAK 60.

Secara garis besar PSAK 60 mengatur ketentuan atas pengungkapan instrumen keuangan dengan dua kategori sebagai berikut:

a. Informasi mengenai signifikansi instrumen keuangan untuk posisi dan kinerja keuangan

PSAK 60 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif. Selain itu entitas juga disyaratkan untuk mengungkapkan mengenai kebijakan akuntansi, akuntansi lindung nilai dan nilai wajar termasuk tingkat dalam hirarki nilai wajar.

b. Informasi mengenai sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan

PSAK 60 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Pengungkapan informasi tersebut berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif. Dalam pengungkapan kualitatif entitas harus mengungkapkan eksposur risiko, bagaimana risiko timbul, tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko serta metode pengukuran risiko. Sedangkan pengungkapan untuk kuantitatif entitas disyaratkan untuk

mengungkapkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar termasuk membuat analisa sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar.

Informasi mengenai sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang terdapat dalam PSAK No 60 sesuai dengan pernyataan Linsley dan Shrives (2006), bahwa perusahaan dikatakan telah mengungkapkan risiko jika pembaca laporan tahunan diberi informasi mengenai kesempatan atau prospek, bahaya, kerugian, ancaman atau eksposur yang akan berdampak bagi perusahaan sekarang maupun masa mendatang. Penyampaian informasi mengenai risiko tersebut menjadi kebutuhan *stakeholder*. Pengungkapan risiko merupakan hal yang penting dalam pelaporan keuangan, karena pengungkapan risiko perusahaan adalah dasar dari praktik akuntansi dan investasi (ICAEW, 1999).

Beberapa peneliti menyatakan pentingnya dan manfaat dari pengungkapan risiko. Pentingnya dan manfaat dari pengungkapan risiko adalah:

1. Menyediakan transparansi yang lebih besar dan meningkatkan kepercayaan investor (Meier *et al.*, 1995; Solomon *et al.*, 2000; Schrand dan Elliott, 1998; Cabedo dan Tirado, 2004; Ahmed *et al.*, 2004; Linsley dan Shrives, 2006; Abraham dan Cox, 2007; Iatridis, 2008; Linsley dan Lawrence, 2007; Spira dan Page, 2003 dalam Hassan, 2009)
2. Untuk memperbaiki *image* perusahaan dan memberi informasi kepada *stakeholder* mengenai kemampuan manajerial perusahaan dalam mengelola risiko (Iatridis, 2008 dalam Hassan, 2009)
3. Dapat menentukan profil risiko perusahaan, estimasi nilai pasar, dan akurasi ramalan harga sekuritas bagi investor (Beretta dan Bozzolan, 2004;

Helliar dan Dunne, 2004; ICAS, 2005; Linsley dan Shrivess, 2001 dalam Hassan, 2009)

4. Untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor serta untuk mengurangi biaya pendanaan eksternal perusahaan (Bujaki *et al.*, 1999 dalam Aljifri dan Hussainey, 2007)

Setiap perusahaan memiliki metode yang berbeda dalam mengungkapkan risiko tergantung karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Linsley dan Shrivess (2006), pengungkapan risiko dalam laporan tahunan saat ini, disediakan dalam beberapa bentuk atau format, namun tidak dalam bentuk yang mudah dipahami oleh para *stakeholder*. Hal tersebut menjadi tantangan bagi manajemen untuk melakukan penyampaian informasi yang rasional sehingga berdampak baik bagi pencapaian tujuan perusahaan.

2.1.4 Karakteristik Perusahaan yang Mempengaruhi Pengungkapan risiko

Manfaat dan biaya yang dikeluarkan untuk pengungkapan mempengaruhi kualitas pengungkapannya. Manajer akan mengungkapkan informasi lebih banyak jika manfaat yang diperoleh dari pengungkapan tersebut lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut (Almalia dan Retrinasari, 2007). Perbedaan biaya dan manfaat dikarenakan adanya perbedaan risiko dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik perusahaan ikut mempengaruhi praktik pengungkapan risiko perusahaan (Hadi dan Sabeni, 2002). Beberapa karakteristik perusahaan yang

digunakan untuk menguji pengaruh terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan adalah:

2.1.4.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran yang biasa digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan diantaranya yaitu total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar nilai total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar ukuran perusahaan. Penelitian ini menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Penggunaan total aset dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa pada penelitian Hassan (2009), total aset yang merupakan proksi ukuran perusahaan ditemukan berhubungan dengan tingkat pengungkapan risiko di UAE. Selain itu, total aset merupakan ukuran yang relatif stabil dibandingkan dengan ukuran lain dalam mengukur ukuran perusahaan (Sudarmaji dan Sularto, 2007). Meningkatnya total aset diikuti dengan meningkatnya modal yang ditanam sehingga tingkat penjualan semakin tinggi. Ketika penjualan meningkat, perputaran uang akan semakin besar menyebabkan tingginya kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar yang tinggi akan membuat perusahaan semakin dikenal dalam masyarakat sehingga menyebabkan pengungkapan risiko yang dilakukan perusahaan semakin besar (Sudarmadji dan Sularto, 2007).

2.1.4.2 Tingkat Profitabilitas

Tingkat profitabilitas merupakan indikator keberhasilan perusahaan terutama kemampuannya dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan

sumber-sumber yang dimilikinya seperti aset atau ekuitas (Taures, 2010). Ukuran atau proksi yang sering digunakan dalam mengukur tingkat profitabilitas diantaranya adalah *Earning per Share* (EPS), *Return on Equity* (ROE), *Return on Assets* (ROI), dan *Net Profit Margin* (NPM). *Net Profit Margin* (NPM) dipilih sebagai proksi tingkat profitabilitas dalam penelitian ini. *Net profit margin* digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih pada tiap tingkat penjualan tertentu yang dilakukan. Penggunaan NPM sebagai proksi didasarkan pada ditemukannya hubungan signifikan antara tingkat profitabilitas, yaitu *Net profit margin* dengan luas pengungkapan informasi *forward-looking* dalam laporan tahunan perusahaan di UAE yang dilakukan Aljifri dan Hussainey (2007). Formula yang digunakan dalam menghitung *Net profit margin* adalah:

$$\text{Net Profit Margin (NPM)} = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Sales}} \times 100\%$$

2.1.4.3 Tingkat Solvabilitas

Tingkat solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan atas proporsi penggunaan hutang dalam membiayai investasi (Endrian, 2010, dalam Taures, 2010). Rasio ini juga digunakan dalam menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang. Ukuran-ukuran yang sering digunakan untuk mewakili tingkat *leverage* perusahaan yaitu *debt to equity ratio*, *debt to asset ratio*, *debt service coverage*, dan *long term debt to total equity*. Penelitian ini menggunakan *debt to asset ratio* sebagai proksi tingkat risiko perusahaan. Penggunaan *debt to asset ratio* dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa pada penelitian Hassan

(2009), *debt to asset ratio* yang merupakan proksi tingkat *leverage* / solvabilitas ditemukan berhubungan signifikan dengan tingkat pengungkapan risiko di UAE.

Debt to asset ratio menggambarkan besarnya hutang perusahaan yang digunakan untuk membiayai aset dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya. Semakin besar *debt to asset ratio* menunjukkan semakin besar tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal (kreditur) sehingga perusahaan tersebut mungkin lebih berisiko mengenai adanya kesulitan pembayaran kewajiban dan bunganya. Formula yang digunakan dalam menghitung *debt to asset ratio* adalah :

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

2.1.4.4 Tingkat Likuiditas

Tingkat likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ukuran atau proksi yang sering digunakan dalam mengukur tingkat likuiditas diantaranya adalah *Quick Test Ratio* (QTR), *Net Working Capital* (NWC), *Current Ratio* (CR). *Current Ratio* (CR) ditentukan sebagai proksi tingkat likuiditas perusahaan dalam penelitian ini. *Current Ratio* (CR) digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendek dengan menggunakan aset lancar perusahaan. Formula yang digunakan dalam menghitung *Current Ratio* (CR) adalah:

$$\text{Current Ratio (CR)} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

2.1.4.5 *Corporate Governance*

Menurut *Organization for Economic Corporation and Development/* OECD (2004), *corporate governance* adalah suatu struktur untuk menetapkan tujuan perusahaan, saran untuk mencapai tujuan tersebut serta untuk menentukan pengawasan atas kinerja perusahaan. Struktur dari *corporate governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders* (Kartika Rini, 2010). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap struktur dari *corporate governance* akan mengandung risiko karena dapat mempengaruhi operasi, tujuan, dan profit perusahaan. Selanjutnya *corporate governance* sesuai dengan teori stakeholder yang memperhatikan kepentingan pemilik dan pihak yang terkait dengan perusahaan. Dengan kata lain, *corporate governance* erat kaitannya dengan risiko yang dimiliki perusahaan sehingga diharapkan mempengaruhi pengungkapan risiko perusahaan.

Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor KEP/134/BL/2006 Peraturan X.K.6. mengemukakan item-item *corporate governance* yang diwajibkan. Item-item *corporate governance* juga diatur di dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2005. Berdasarkan peraturan dan pedoman tersebut, diperoleh sebanyak 16 *point item* yang terdiri dari pemegang saham; dewan komisaris; dewan direksi; komite audit; komite nominasi dan remunerasi; komite manajemen risiko; komite-komite lain

yang dimiliki perusahaan; sekretaris perusahaan; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal; manajemen risiko perusahaan; perkara penting yang dihadapi oleh perusahaan, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris; akses informasi dan data perusahaan; etika perusahaan; tanggung jawab sosial; pernyataan penerapan *good corporate governance*; dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*.

Item struktur *corporate governance* yang dipakai di dalam penelitian ini adalah keahlian keuangan audit, frekuensi pertemuan audit, struktur kepemilikan saham publik, dan jenis kepemilikan perusahaan.

2.1.4.5.1 Keahlian Komite Audit

Dewan Komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang memiliki peran sebagai pengawas penerapan manajemen risiko untuk memastikan perusahaan memiliki program penerapan manajemen risiko yang efektif (Wulandari, 2012). Dewan Komisaris dapat mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite salah satunya adalah komite audit. Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa salah satu peran dan tanggung jawab Komite Audit adalah mengenai manajemen risiko dan kontrol, yaitu mengawasi proses manajemen risiko dan pengendalian perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa tugas pengawasan manajemen risiko, pada sebagian besar perusahaan, diamanatkan kepada Komite Audit untuk mencapai manajemen risiko yang sesuai (Krus dan Orowitz, 2009).

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, anggota Komite Audit disyaratkan independen dan

sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki di bidang akuntansi atau keuangan. Kemudian berdasarkan pedoman *corporate governance* FCGI (2002), anggota Komite Audit harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang akuntansi dan keuangan, serta memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Selanjutnya dijelaskan bahwa latar belakang pendidikan merupakan hal penting dalam memastikan bahwa Komite Audit dapat bekerja secara efektif (Rahmat *et al.*, 2009). Hal tersebut jika dikaitkan dengan tugas komite audit dalam mengawasi manajemen risiko, satu anggota Komite Audit harus memiliki suatu keahlian keuangan dan latar belakang pendidikan untuk mengerti dan memahami tentang informasi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Keahlian komite audit diharapkan memiliki hubungan dengan pengungkapan risiko perusahaan.

2.1.4.5.2 Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Artikel FCGI (2002) menyebutkan bahwa Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan. Treadway Commission (1987) dalam Sori *et al.*, (2007) juga menyatakan Komite Audit sebaiknya bertemu minimal empat kali dalam satu tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertemuan komite audit merupakan hal yang penting dan berkaitan dengan pelaporan keuangan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Vafeas, 1999 dalam Rahmat *et al.*, 2009 yaitu efektivitas Komite Audit dalam pemenuhan tanggung jawabnya sebagai pengawas

proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal membutuhkan pertemuan yang teratur.

Pertemuan rutin meningkatkan komunikasi yang baik di dalam komite dan dapat membantu perusahaan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi tingkat risiko (Tao dan Hutchinson, 2011). Pertemuan rutin akan membantu anggota komite audit untuk bertemu dan memudahkan bertukar informasi terkait dengan risiko perusahaan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa frekuensi pertemuan dapat memungkinkan risiko potensial diidentifikasi, didiskusikan, dan dihindari. Frekuensi pertemuan audit berkaitan erat dengan pengawasan laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sehingga meminimalisasi risiko yang dialami oleh perusahaan. Oleh karena itu, frekuensi pertemuan komite diharapkan menjadi sebuah faktor dalam luasnya pengungkapan informasi risiko perusahaan.

2.1.4.5.3 Struktur Kepemilikan Saham Publik

Struktur kepemilikan saham (pemegang saham) merupakan salah satu bagian *corporate governance*. Struktur kepemilikan saham terbagi menjadi dua yaitu, kepemilikan saham internal (manajerial) dan kepemilikan saham eksternal (publik). Pihak pemilik saham internal (manajerial) adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial perusahaan (Sudarma, 2003). Pihak pemilik saham eksternal (publik) yang dimaksud adalah investor instutional, masyarakat luas dan sebagainya (Friend dan Hasbrouk, 1988). Karena termasuk menjadi bagian *corporate governance*, struktur kepemilikan memiliki keterkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa struktur

kepemilikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Kemungkinan suatu perusahaan berada pada posisi tekanan keuangan juga banyak dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan tersebut (Annisa, 2012).

Struktur kepemilikan saham publik mengindikasikan bahwa kepentingan perusahaan tidak hanya ada pada manajerial perusahaan tetapi secara luas ada di tangan publik. Jika dikaitkan dengan teori *stakeholder*, semakin banyak saham dimiliki oleh publik, maka perusahaan akan semakin dituntut untuk memuaskan kepentingan *stakeholder* dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cerf dan Shinghvi dalam hardina Rosmasita (2007), struktur kepemilikan saham publik berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan. Semakin banyaknya saham yang dimiliki oleh publik maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi risiko yang dihadapi perusahaan. Kondisi tersebut akan diikuti dengan tekanan yang semakin besar untuk mengungkapkan informasi risiko yang dihadapi perusahaan. Tipe kepemilikan saham publik adalah perbandingan jumlah pemegang saham publik dengan yang dimiliki perusahaan (Sudarmadji dan Sularto, 2007)

Struktur Kepemilikan Saham Publik = —————

2.1.4.5.4 Jenis Kepemilikan Perusahaan

Perusahaan publik merupakan suatu perusahaan yang mempublikasikan segala informasi tentang laporan keuangan perusahaan kepada publik atau kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat atau pihak eksternal perusahaan dapat

dengan mudah memperoleh informasi tentang laporan keuangan perusahaan publik tersebut (Shinta dan Nurmala, 2012). Pada suatu perusahaan publik terdapat struktur kepemilikan perusahaan yang menunjukkan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki perusahaan. Peranan pemilik akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan, baik berupa penentuan strategi, pengalokasian sumber daya, dan pengimplementasian strategi tersebut untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut sesuai dengan teori *stakeholder* bahwa *stakeholder* menyediakan dukungan terhadap perusahaan dengan mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara memuaskan kepentingan para *stakeholdernya* (Ulman, 1985 dalam Ghazali dan Chariri, 2007). Dengan mengklasifikasikan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak individu (kepemilikan keluarga), dan pihak pemerintah (kepemilikan pemerintah), dan pihak asing (kepemilikan asing), kita bisa melihat apakah jenis kepemilikan berhubungan dengan tingkat pengungkapan risiko perusahaan.

Jenis kepemilikan saham diantaranya adalah:

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan, contohnya kepemilikan saham oleh anggota Board of Director (BOD) perusahaan. Kepemilikan saham manajerial cenderung mengindikasikan bahwa manajemen lebih merasa memiliki perusahaan. Peningkatan atas kepemilikan manajerial akan membuat kekayaan manajemen, secara pribadi, semakin terikat dengan kekayaan perusahaan sehingga manajemen

akan berusaha mengurangi risiko kehilangan kekayaannya (Tamba, 2011). Struktur kepemilikan manajerial dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajerial yaitu presentase jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

2. Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan saham oleh keluarga atau sekelompok orang yang masih memiliki relasi kerabat umumnya terdapat pada perusahaan keluarga yang diwariskan turun-temurun. Perusahaan keluarga memiliki ciri khas yaitu umumnya memiliki struktur piramida yang menunjukkan hubungan antara perusahaan induk (parent) dengan beberapa perusahaan anak (subsidiary) (Morck dan Yeung, 2003). Menurut Poza (2007) definisi dari *family bussines* bisa dilihat dari kontrol *ownership* dari dua anggota atau lebih, dari keluarga atau *partnership* dari keluarga, strategi dalam manajemen perusahaan dipengaruhi oleh anggota keluarga baik itu sebagai *advisor* dalam anggota dewan atau menjadi pemegang saham, lebih peduli pada hubungan keluarga, yang terakhir visi dari pemilik perusahaan keluarga berlanjut sampai ke beberapa generasi.

3. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan saham oleh pemerintah suatu negara umumnya terdapat pada perusahaan milik negara atau BUMN ataupun perusahaan milik negara yang sudah *go public*. Privatisasi adalah cara penjualan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjual beberapa persen saham perusahaan milik negara kepada pihak pribadi atau pihak swasta. UU No 19 tahun 2003 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya dijelaskan pada butir ke 2 bahwa Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

4. Kepemilikan Saham oleh Pihak Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Aryani, 2011). Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Djakman dan Machmud, 2008). Lee (2008) berpendapat bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan institusional lebih mampu mengendalikan kebijakan manajemen karena memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik di bidang keuangan dan bisnis. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing biasanya lebih sering menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan hambatan geografis dan bahasa. Oleh sebab itu perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan luas (Xiao et al., 2004). Struktur kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, dapat dirumuskan dengan presentase jumlah kepemilikan saham oleh pihak asing dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengungkapan risiko telah dilakukan di berbagai negara. Linsley dan Shrives (2006) meneliti tentang pengungkapan risiko dalam laporan tahunan 79 perusahaan di UK. Penelitian tersebut bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara jumlah informasi risiko yang diungkap dengan ukuran perusahaan dan tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan hubungan signifikan antara ukuran perusahaan dan tingkat risiko lingkungan terhadap luas pengungkapan risiko

Penelitian juga dilakukan Aljifri dan Hussainey (2007) yang menguji faktor-faktor yang menentukan pengungkapan informasi *forward looking* yaitu risiko dan ketidakpastian dalam laporan tahunan perusahaan UAE. Sampel penelitian tersebut menggunakan 46 laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di pasar keuangan Dubai atau pasar sekuritas Abu Dubai yaitu sekitar 74% dari total perusahaan yang terdaftar di akhir tahun 2004. Penelitian berfokus pada bagian naratif pada *chairman statement*, laporan CEO, dan laporan direksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *debt ratio* dan profitabilitas dengan pengungkapan informasi *forward looking*. Namun, jenis perusahaan dan ukuran perusahaan tidak signifikan.

Hassan (2009) juga melakukan penelitian pengungkapan risiko menguji karakteristik khusus perusahaan dalam 41 perusahaan-perusahaan di United Arab Emirates (UAE) terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa ukuran perusahaan tidak signifikan terhadap tingkat

pengungkapan risiko perusahaan, sedangkan level risiko dan tipe industri perusahaan berhubungan signifikan. Kemudian cadangan perusahaan juga ditemukan tidak berhubungan secara signifikan terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan. Peneliti menggunakan standar akuntansi, penelitian terdahulu, dan kerangka peraturan UAE untuk mengembangkan indeks pengungkapan risiko. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Amran *et al.*, (2009) meneliti pengungkapan manajemen risiko dalam laporan tahunan 100 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia menemukan hubungan signifikan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan risiko. Penelitian tersebut bertujuan untuk menyelidiki faktor–faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko seperti tingkat risiko perusahaan yang diwakilkan oleh strategi diversifikasi, ukuran perusahaan, jenis perusahaan, dan tingkat *leverage*. Jenis perusahaan perusahaan juga ditemukan memiliki hubungan positif dengan luas pengungkapan risiko. Peneliti menggunakan teori *stakeholder* dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Luas pengungkapan risiko diukur dengan menggunakan *content analysis* berdasarkan jumlah kalimat yang mengandung informasi risiko.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengungkapan risiko merupakan topik yang masih sedikit dibahas. Penelitian yang dilakukan oleh Taures (2010) menemukan bahwa ukuran perusahaan dan jenis perusahaan berhubungan positif terhadap pengungkapan risiko, sedangkan diversifikasi produk dan geografis, tingkat leverage, serta tingkat profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Anisa

(2012) menemukan bahwa tingkat *leverage* dan ukuran perusahaan berhubungan signifikan terhadap pengungkapan risiko. Jenis industri, tingkat profitabilitas, dan struktur kepemilikan publik tidak berhubungan signifikan dengan pengungkapan risiko perusahaan.

Penelitian yang lain hanya berfokus pada pengungkapan secara umum, yaitu pengungkapan sosial dan sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) menemukan bahwa kepemilikan manajemen berhubungan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan informasi sosial perusahaan. *Financial leverage*, biaya politis, dan tingkat profitabilitas tidak berhubungan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan informasi sosial perusahaan. Kemudian dalam penelitian Almalia dan Retrinasari (2007), menemukan tingkat likuiditas, tingkat risiko perusahaan, ukuran perusahaan, dan status perusahaan memiliki hubungan positif signifikan dengan kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan, sedangkan tingkat profitabilitas tidak memiliki hubungan signifikan dengan kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan. Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan oleh penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007) bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas perusahaan, tingkat *leverage* dan tingkat profitabilitas memiliki hubungan negatif signifikan dengan pengungkapan informasi sukarela perusahaan.

Ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan informasi perusahaan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
Linsley dan Shrives (2006)	<i>Risk Reporting: A Study of Risk Disclosures in the Annual Reports of UK Companies</i>	1) Ukuran Perusahaan 2) Tingkat Risiko Perusahaan	(1) Ukuran perusahaan berhubungan secara signifikan dengan luas pengungkapan risiko. (2) Hanya <i>BiE Index</i> dan <i>the EcoValue'21TM Rating Model</i> yang mewakili tingkat risiko perusahaan yang berhubungan secara signifikan dengan luas pengungkapan risiko.
Aljifri dan Hussainey (2007)	<i>The Determinants of Forward-Looking Information in Annual Reports of UAE Companies</i>	1) Debt Ratio 2) Profitabilitas 3) Ukuran Perusahaan 4) Jenis Industri	(1) <i>Debt ratio</i> dan profitabilitas berhubungan signifikan dengan luas pengungkapan informasi <i>forward-looking</i> . (2) Jenis industri dan ukuran perusahaan tidak berhubungan signifikan dengan tingkat pengungkapan.
Hassan (2009)	<i>UAE Corporations-specific Characteristics and Level of Risk Disclosure</i>	1) Ukuran Perusahaan 2) Tingkat Risiko Perusahaan 3) Tipe Industri 4) Cadangan Perusahaan	(1) Ukuran perusahaan dan cadangan perusahaan tidak berhubungan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan risiko perusahaan.

			(2) Tingkat risiko perusahaan dan jenis industri berhubungan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan risiko.
Amran <i>et al.</i> (2009)	<i>Risk Reporting: An Exploratory Study on Risk Management Disclosure in Malaysian Annual Report</i>	1) Tingkat Leverage 2) Ukuran Perusahaan 3) Jenis Industri	(1) Tingkat <i>leverage</i> tidak berhubungan secara signifikan dengan luas pengungkapan risiko. (2) Ukuran perusahaan dengan jenis industri (khususnya infrastruktur dan teknologi) memiliki hubungan signifikan dengan luas pengungkapan risiko.
Retno Anggraini (2006)	Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan	1) Kepemilikan Manajemen 2) <i>Financial Leverage</i> 3) Biaya Politik 4) Tingkat Profitabilitas	(1) Kepemilikan manajemen berhubungan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan informasi sosial perusahaan. (2) <i>Financial leverage</i> , biaya politik, dan tingkat profitabilitas tidak berhubungan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan informasi sosial.
Almalia dan Retrinasari (2007)	Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan	1) Tingkat Likuiditas 2) Tingkat Risiko Perusahaan	1) Tingkat likuiditas, tingkat risiko perusahaan, ukuran perusahaan, dan status perusahaan memiliki

	dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEJ	3) Tingkat Profitabilitas 4) Ukuran Perusahaan 5) Status Perusahaan	hubungan positif signifikan dengan pengungkapan laporan tahunan perusahaan. 2) Tingkat profitabilitas tidak memiliki hubungan signifikan dengan pengungkapan laporan tahunan perusahaan.
Sudarmadji dan Sularto (2007)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan	1) Ukuran Perusahaan 2) Tingkat Profitabilitas 3) Tingkat <i>Leverage</i> 4) Tipe Kepemilikan Perusahaan	Ukuran Perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat <i>leverage</i> dan jenis kepemilikan perusahaan berhubungan negatif signifikan dengan tingkat pengungkapan.
Nazila Taures (2010)	Analisis Hubungan antara Karakteristik Perusahaan dengan Pengungkapan Risiko	1) Ukuran Perusahaan 2) Jenis Perusahaan 3) Diversifikasi Produk dan Geografis 4) Tingkat <i>Leverage</i> 5) Tingkat Profitabilitas	(1) Ukuran perusahaan dan jenis perusahaan berhubungan secara signifikan dengan luas pengungkapan risiko. (2) Diversifikasi produk dan geografis, tingkat <i>leverage</i> , dan tingkat profitabilitas tidak memiliki hubungan signifikan dengan luas pengungkapan risiko.
Windy Gessy Anisa (2012)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen Risiko	1) Tingkat <i>Leverage</i> 2) Ukuran Perusahaan 3) Jenis Industri 4) Tingkat Profitabilitas	1) Tingkat <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan berhubungan signifikan terhadap pengungkapan risiko. 2) Jenis industri,

		5) Struktur Kepemilikan Publik	tingkat profitabilitas, dan struktur kepemilikan publik tidak berhubungan signifikan dengan pengungkapan risiko.
--	--	--------------------------------	--

Sumber: review dari berbagai sumber

2.2 Kerangka Pemikiran

Semakin besar ukuran perusahaan yang dilihat dalam total aset, semakin besar juga tingkat pengungkapan risiko yang dilakukan. Hal ini karena kegiatan usaha yang mungkin semakin kompleks, yang melibatkan banyak *stakeholder* sehingga pengungkapan yang dilakukan akan menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan kepada publik. Karakteristik lain yaitu tingkat profitabilitas. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi diikuti dengan risiko yang tinggi. Tingginya risiko yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi risiko yang semakin luas. Tingkat solvabilitas juga dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi risiko. Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin luas juga pengungkapan risikonya karena ketika perusahaan memiliki tingkat hutang yang lebih tinggi, kreditur berada dalam posisi menawar untuk menekan perusahaan untuk mengungkap informasi yang lebih banyak. Kemudian semakin tinggi tingkat likuiditas, maka semakin tinggi juga pengungkapan yang dilakukan atas risiko perusahaan. Hal itu dikarenakan tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Semakin

kuatnya kondisi keuangan perusahaan diikuti dengan risiko yang semakin tinggi dan mendorong pengungkapan yang lebih luas.

Karakteristik *corporate governance* juga dikaitkan dengan pengungkapan risiko perusahaan. Karakteristik yang pertama adalah keahlian komite audit. Keahlian komite audit menunjukkan pemahaman akan risiko perusahaan sehingga berpengaruh pada luasnya pengungkapan risiko perusahaan. Kemudian frekuensi pertemuan audit. Semakin banyak pertemuan rutin yang diadakan oleh komite audit, maka semakin banyak informasi risiko yang diidentifikasi oleh perusahaan sehingga semakin luas pengungkapan risikonya. Struktur kepemilikan saham publik juga berhubungan positif dengan pengungkapan risiko perusahaan. Semakin besar saham yang dipegang oleh publik, maka semakin tinggi risikonya dan semakin luas pengungkapannya. Yang terakhir adalah jenis kepemilikan saham perusahaan. Kepemilikan saham perusahaan akan mengidentifikasi apakah perbedaan jenis kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian lebih lanjut. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diuraikan berdasarkan hubungan antara karakteristik khusus perusahaan dengan pengungkapan risiko, adalah sebagai berikut:

2.3.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah sebuah proxy dari 2 hal yang berhubungan: sensitivitas politik dan skala ekonomi (Hassan, 2009).

1. Semakin besar perusahaan maka semakin tinggi sensitivitas politiknya. Hal tersebut memiliki arti besarnya perusahaan mempengaruhi kemampuan memiliki sebuah kemampuan monopoli dalam pasar. Oleh karena itu, semakin besar perusahaan cenderung untuk menunjukkan level informasi yang berhubungan dengan risiko yang menjelaskan tingkat keuntungan perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi sensitivitas politik.
2. Semakin besar perusahaan, semakin baik informasi yang dimilikinya. Oleh karena itu, tambahan pengungkapan akan mengurangi biaya dalam perusahaan yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil.

Kemudian Amran *et al.* (2009), menambahkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin meningkat jumlah *stakeholder* yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan teori *stakeholder*, dengan peningkatan keterlibatan jumlah *stakeholder*, maka kewajiban pengungkapan menjadi lebih besar untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* (Amran *et al.*, 2009).

Penelitian-penelitian untuk menguji ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan sukarela telah dilakukan di beberapa negara. Linsley dan Shrives (2006), dan Amran *et al.*, (2009) menemukan hubungan positif yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan risiko perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut,

H1: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan

2.3.2 Tingkat Profitabilitas

Tingkat profitabilitas merupakan tolak ukur kemajuan perusahaan dilihat dari laba yang dihasilkan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi diikuti dengan risiko yang tinggi. Tingginya risiko yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi risiko yang semakin luas. Terdapat hubungan yang positif antara tingkat profitabilitas dan pengungkapan risiko karena manajer perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dapat memberikan informasi yang lebih besar untuk meningkatkan kepercayaan investor dan dengan demikian untuk meningkatkan kompensasi mereka (Singhvi dan Desai, 1971 dalam Aljifri dan Hussainey, 2007)

Perusahaan yang memiliki penurunan profitabilitas atau kerugian akan cenderung menutupi risiko yang mereka hadapi karena takut terjadinya penurunan investasi dan kepercayaan investor terhadap pengelola perusahaan. Hal ini dikarenakan rendahnya profitabilitas mengindikasikan tingginya risiko yang dihadapi perusahaan (Barry dan Brown, 1986; Prodham dan Harris, 1989 dalam Aljifri dan Hussainey, 2007). Hubungan yang positif antara tingkat profitabilitas dengan luas pengungkapan informasi *forward-looking* dalam laporan tahunan perusahaan di UAE ditemukan dalam penelitian yang dilakukan Aljifri dan Hussainey (2007). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Tingkat Profitabilitas Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan

2.3.3 Tingkat Solvabilitas

Hassan (2009) menjelaskan leverage perusahaan sebagai sebuah proksi risiko, mungkin berdampak pada level CRD. Di satu sisi, manajer perusahaan cenderung untuk mendukung pengungkapan yang berkaitan dengan risiko ketika situasi keuangan perusahaan tidak baik. Di sisi lain, perusahaan dengan level risiko yang lebih tinggi, akan mengungkapkan jumlah informasi yang lebih besar karena manajer-manajer perusahaan ingin untuk menjelaskan akibat dari risiko yang tinggi. Manajer-manajer juga memiliki kemalasan personal untuk mengungkapkan informasi risiko yang lebih luas kepada *stakeholder* bagaimana mereka secara efisien mengatur risiko ini.

Hassan (2009) melakukan penelitian yang menggunakan ukuran *debt to asset* untuk mewakili tingkat *leverage* dan menemukan hubungan yang positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan di UAE. Hipotesis berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut,

H3: Tingkat Solvabilitas Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan

2.3.4 Tingkat Likuiditas

Tingkat likuiditas merupakan tolak ukur kemajuan perusahaan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Cooke

(1989) dalam Marwata (2001) menjelaskan bahwa tingkat likuiditas dapat dikaitkan dengan kondisi keuangan perusahaan. Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin kuatnya kondisi keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya diikuti dengan risiko yang semakin tinggi. Kondisi ini akan mendorong perusahaan mengungkapkan informasi risiko yang lebih luas kepada pihak luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu kredibel.

Wallace et al (1994) dalam Fitriani (2001) menyatakan bahwa likuiditas dapat juga dipandang sebagai ukuran kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Kinerja yang tinggi juga berhubungan dengan risiko yang tinggi. Kinerja yang tinggi juga akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas atas informasi risiko yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian tentang hubungan antara rasio likuiditas dengan luas pengungkapan telah dikemukakan oleh Cooke (1989) dalam Fitriani (2001). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio likuiditas mempunyai hubungan positif dengan luas pengungkapan. Berdasarkan analisis dan temuan penelitian diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4: Tingkat Likuiditas Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan

2.3.5 Keahlian Komite Audit

Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan memiliki tingkat risiko yang tinggi akan mengungkap pembenaran dan penjelasan mengenai apa yang terjadi dalam perusahaan (Amran *et al.*, 2009). Anggota Komite Audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan memiliki kemampuan untuk lebih memahami permasalahan dan risiko serta prosedur yang diusulkan untuk mengatasi dan mendeteksi masalah dan risiko tersebut (DeZoort dan Salterio, 2001 dalam Yatim, 2009). Jika dikaitkan, maka anggota komite audit harus memiliki kemampuan yang memadai untuk meningkatkan efektivitasnya sehingga mampu mengidentifikasi risiko yang ada dalam perusahaan sehingga memuaskan kebutuhan *stakeholder*. Keberadaan personil berkeahlian akuntansi dan keuangan sebagai anggota Komite Audit diharapkan dapat mengadopsi standar akuntabilitas dan tingkat prestasi yang tinggi, dapat menyediakan bantuan dalam pengendalian dan pengawasan (Wulandari, 2012). Oleh karena itu, Komite Audit dengan anggota yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan, sekurang-kurangnya satu orang, diharapkan lebih terlibat aktif dalam proses manajemen risiko sehingga mendukung pengungkapan risiko perusahaan.

RMC (*Risk Management Comitee*) merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk khusus mengawasi pelaksanaan manajemen risiko perusahaan (Wulandari, 2012). Dalam penelitian Yatim (2009), keahlian keuangan Komite Audit memiliki hubungan positif terhadap pembentukan RMC walaupun tidak signifikan. Penelitian mengenai hubungan keahlian komite audit dengan pengungkapan risiko perusahaan belum pernah dilakukan sebelumnya. RMC dapat dikaitkan dengan pengungkapan risiko

perusahaan karena RMC mengawasi pelaksanaan manajemen risiko perusahaan sehingga mempengaruhi pengungkapan risiko perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H5: Keahlian Komite Audit Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan

2.3.6 Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Menurut teori *stakeholder*, ketika *stakeholder* menyediakan dukungan terhadap perusahaan dengan mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara memuaskan kepentingan para *stakeholdernya* (Ulman, 1985 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Kepuasan *stakeholder* dapat diwujudkan oleh komite audit dengan meningkatkan efektivitasnya dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal (Wulandari, 2012). Selanjutnya dijelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman dibutuhkan untuk memahami tugasnya dalam proses pelaporan keuangan. Pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat diperluas dengan pertemuan rutin komite audit. Peningkatan frekuensi pertemuan dapat memberikan kesempatan untuk para anggota dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perusahaan.

Penelitian mengenai hubungan antara frekuensi pertemuan komite audit dengan pengungkapan risiko perusahaan belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Yatim (2009) menunjukkan bahwa Komite Audit yang mengadakan pertemuan rutin dapat mengurangi masalah dalam pelaporan

keuangan (Wulandari, 2012). Kemudian Leech (2005) dalam Yatim (2009) menunjukkan Komite Audit pada perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat yang melakukan pertemuan lebih sering dan mendapatkan informasi yang lebih baik tentang kondisi pengendalian internal, menunjukkan sebuah peningkatan dalam tugas pengawasan. Frekuensi pertemuan audit ternyata juga berhubungan dengan risiko perusahaan. Pertemuan rutin meningkatkan komunikasi yang baik di dalam komite dan dapat membantu perusahaan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi tingkat risiko (Tao dan Hutchinson, 2011). Oleh karena itu, frekuensi pertemuan komite audit meningkatkan level pengawasan proses dan aktivitas manajemen risiko. Dengan demikian, semakin tinggi frekuensi pertemuan komite audit diharapkan berhubungan dengan pengungkapan risiko perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan ialah:

H6: Frekuensi Pertemuan Komite Audit Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan

2.3.7 Struktur Kepemilikan Saham Publik

Pemilik saham eksternal (publik) adalah pemilik saham di luar pemilik manajerial. Pihak-pihak yang dimaksud meliputi investor institutional, masyarakat luas dan sebagainya (Friend dan Hasbrouk, 1988). Menurut *Stakeholder theory* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (Ghozali dan Chariri, 2007). Semakin banyak saham yang dimiliki publik, maka

semakin banyak *stakeholder* yang harus merasakan manfaat dalam hal laporan keuangan maupun tahunan oleh perusahaan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pihak perusahaan semakin dituntut untuk memberikan laporan yang transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap investor.

Penelitian mengenai struktur kepemilikan saham publik yang dikaitkan dengan luas pengungkapan menunjukkan hasil yang signifikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Cerf dan Shinghvi dalam Hardina Rosmasita (2007). Semakin banyaknya saham yang dimiliki oleh publik maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi risiko yang dihadapi perusahaan. Kondisi tersebut akan diikuti dengan tekanan yang semakin besar untuk mengungkapkan informasi risiko yang dihadapi perusahaan. Penelitian yang dilakukan Retno Angraini (2006), menemukan pengaruh yang signifikan antara struktur kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Berdasarkan analisis dan temuan penelitian diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H7: Struktur Kepemilikan Saham Publik Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan

2.3.8 Jenis Kepemilikan Perusahaan

Jenis kepemilikan perusahaan menunjukkan keterlibatan perusahaan ke dalam strategi tertentu sesuai dengan karakteristik pemilik perusahaan. Perusahaan-perusahaan dengan jenis kepemilikan yang sama akan cenderung untuk menunjukkan level pengungkapan risiko yang sama dalam tujuan untuk

mencegah apresiasi negatif oleh pasar. Hassan (2009) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang bekerja dalam lingkungan sosial politik yang sama, cenderung untuk mengadopsi strategi pelaporan yang sama karena memiliki tekanan legal dan profesional yang sama. Hal tersebut juga berlaku pada jenis kepemilikan perusahaan. Jenis kepemilikan yang sama akan cenderung mengadopsi strategi pelaporan yang sama karena memiliki sistem yang sama untuk memakmurkan kekayaan pemiliknya. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Amran *et al.* (2009), yang menyatakan bahwa perusahaan yang beroperasi pada industri yang berbeda mungkin berpengalaman dalam menghadapi jenis risiko yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut menghadapi kegiatan usaha, peraturan, kebijakan akuntansi, pengukuran, penilaian, dan teknik pengungkapan yang berbeda sesuai dengan karakteristik industrinya, yang akan menghasilkan pula perbedaan tingkat pengungkapan perusahaannya (Aljifri dan Hussainey, 2007; Amran *et al.*, 2009).

Penelitian mengenai hubungan jenis kepemilikan perusahaan dengan pengungkapan risiko belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian telah dilakukan sebelumnya menguji pengaruh karakteristik industri atau jenis perusahaan terhadap level pengungkapan risiko perusahaan. Hassan (2009) menemukan bahwa jenis perusahaan yang dibagi menjadi perusahaan keuangan dan non keuangan, berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan. Amran *et al.*, (2009). Juga menemukan bahwa karakteristik industri berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Dengan asumsi perlakuan industri yang sama akan memiliki persamaan tindakan dengan jenis kepemilikan

perusahaan, maka penelitian ini melihat apakah jenis perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut,

H8: Jenis Kepemilikan Perusahaan Berpengaruh terhadap
Pengungkapan Risiko Perusahaan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kualitas pengungkapan risiko perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan karakteristik perusahaan yaitu ukuran perusahaan, rasio keuangan perusahaan (tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas), dan *corporate governance* (kepemilikan saham publik, jenis kepemilikan perusahaan, keahlian komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit) sebagai variabel independen dan kualitas pengungkapan risiko perusahaan sebagai variabel dependen. Adapun definisi operasional dari variabel tersebut:

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini diwakili dengan tingkat pengungkapan risiko perusahaan yang terdapat pada laporan tahunan. Pengungkapan risiko merupakan pemberian informasi kepada *stakeholder* melalui laporan tahunan mengenai potensi kesempatan dan/atau hambatan maupun eksposur pada strategi, tindakan dan kinerja perusahaan yang telah atau akan berpengaruh pada perusahaan (Linsley dan Shrives, 2006).

Untuk mengukur kelengkapan pengungkapan, penelitian ini menggunakan metode indeks pengungkapan risiko atas laporan tahunan perusahaan. Indeks

pengungkapan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur perbedaan dalam praktik pengungkapan antar perusahaan yang satu dengan yang lain. Semakin banyak suatu perusahaan dalam mengungkapkan risiko yang dimilikinya maka semakin ia mempunyai kemampuan untuk menghindari risiko tersebut. Indeks CRD yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada indeks yang terdapat dalam penelitian Hassan (2009) yang membagi 45 item pengungkapan menjadi 7 kelompok risiko (Lampiran A). Kelompok risiko tersebut adalah Risiko Informasi Umum, Kebijakan Akuntansi, Instrumen Keuangan, Derivatif Lindung Nilai, Cadangan, Informasi Segmen, Risiko Keuangan dan Risiko lain. Kelompok risiko mewakili pengungkapan risiko perusahaan menurut Amran et al (2009) diantaranya:

1. Risiko keuangan merupakan risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan perusahaan seperti risiko pasar, kredit, likuiditas, serta tingkat bunga atas arus kas. Dalam indeks pengungkapan risiko, risiko keuangan dikelompokkan dalam kelompok risiko keuangan dan risiko lain.

2. Risiko operasi merupakan risiko yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan, pengembangan produk, pencarian sumber daya, kegagalan produk, dan lingkungan. Dalam indeks pengungkapan risiko, risiko operasi juga dikelompokkan dalam kelompok risiko keuangan dan risiko lain.

3. Risiko kekuasaan merupakan risiko yang berkaitan dengan sumberdaya manusia dan kinerja para karyawan. Dalam indeks pengungkapan risiko, risiko kekuasaan dikelompokkan dalam kelompok risiko informasi umum.

4. Risiko teknologi dan pengolahan informasi merupakan risiko yang berkaitan dengan akses, ketersediaan, dan infrastruktur teknologi dan informasi yang dimiliki perusahaan. Dalam indeks pengungkapan risiko, risiko teknologi dan pengolahan informasi dikelompokkan dalam kelompok risiko informasi segmen.

5. Risiko integritas merupakan risiko yang berkaitan dengan kecurangan manajemen dan karyawan, tindakan ilegal, dan reputasi.

6. Risiko strategi merupakan risiko yang berkaitan dengan pengamatan lingkungan, industri, portofolio bisnis, pesaing, peraturan, politik dan kekuasaan. Dalam indeks pengungkapan risiko, risiko kekuasaan dikelompokkan dalam kelompok risiko informasi umum.

7. Risiko informasi akuntansi berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam indeks pengungkapan risiko, risiko kebijakan akuntansi dikelompokkan dalam kelompok kebijakan akuntansi, kelompok instrumen keuangan, kelompok derivative lindung nilai, dan kelompok cadangan.

Semua informasi mengenai pengungkapan risiko dalam laporan tahunan perusahaan akan sangat membantu dan dibutuhkan *stakeholders* dalam pengambilan keputusan.

Indeks pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan adalah metode indeks pengungkapan risiko berdasarkan penelitian Hassan (2009) yaitu membandingkan isi dari laporan

tahunan masing-masing perusahaan dalam daftar item pengungkapan. Indeks skor pengungkapan yang dilakukan adalah maksimum sebesar 45 (Lampiran A). Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai 1 pada item yang diungkapkan, sedangkan nilai 0 diberikan pada item yang tidak diungkapkan.

2. Model pengungkapan yang digunakan tidak diberi bobot sehingga item pengungkapan diperlakukan sama, artinya tidak membedakan relatif pentingnya item informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian akuntansi, baik item yang berbobot maupun yang tidak berbobot memiliki kegunaan (Hassan, 2009). Untuk tujuan dalam penelitian ini, indeks pengungkapan yang tidak berbobot dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada kelompok pengguna tertentu. Sebaliknya, penelitian ini ditujukan untuk semua pengguna dari laporan tahunan dan karena itu tidak dibutuhkan untuk membuat perbedaan tingkat kepentingan untuk item pengungkapan risiko (Oliveira *et al.*, 2006).

Batasan ketentuan item yang dianggap sebagai pengungkapan risiko yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh Linsley dan Shrivies (2006), yaitu:

1. Kalimat yang dianggap sebagai pengungkapan risiko adalah jika pembaca diberi informasi tentang kesempatan atau prospek, atau tentang risiko, bahaya, kerugian dan hambatan, yang telah atau akan berdampak pada perusahaan di masa depan,

2. Definisi risiko tersebut dapat ditafsirkan sebagai risiko baik, risiko buruk, dan ketidakpastian,
3. Pengungkapan harus secara eksplisit dinyatakan, tidak dapat ditandakan,
4. Pengungkapan yang diulangi akan dicatat sebagai kalimat pengungkapan risiko setiap kali hal tersebut didiskusikan,
5. Jika sebuah pengungkapan terlalu samar untuk diidentifikasi, maka tidak akan dicatat sebagai pengungkapan risiko.

Untuk menghitung indeks pengungkapan risiko dapat dirumuskan sebagai berikut:

Indeks Pengungkapan Risiko (CRD) = _____

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik-karakteristik khusus perusahaan yaitu ukuran perusahaan, rasio keuangan perusahaan (tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas), dan *corporate governance* (kepemilikan saham publik, jenis kepemilikan perusahaan, keahlian komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit). Bagian ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai variabel-variabel independen tersebut.

3.1.2.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diwakili dengan menggunakan total aset perusahaan. Penggunaan total aset dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa pada

penelitian Hassan (2009), total aset yang merupakan proksi ukuran perusahaan ditemukan berhubungan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan risiko di UAE (*United Arab Emirates*). Formula yang digunakan dalam menghitung Total Aset adalah:

$$\text{Total Aset} = \ln (\text{Total Aset})$$

3.1.2.2 Tingkat Profitabilitas

Tingkat profitabilitas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. *Net Profit Margin* (NPM) dipilih sebagai proksi tingkat profitabilitas dalam penelitian ini. *Net profit margin* digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih pada tiap tingkat penjualan tertentu yang dilakukan. Penggunaan NPM sebagai proksi didasarkan pada ditemukannya hubungan signifikan antara tingkat profitabilitas, yaitu *Net profit margin* dengan luas pengungkapan informasi *forward-looking* dalam laporan tahunan perusahaan di UAE yang dilakukan Aljifri dan Hussainey (2007). Formula yang digunakan dalam menghitung *Net profit margin* adalah:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Sales}}$$

3.1.2.3 Tingkat Solvabilitas (*Leverage*)

Tingkat solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Rasio ini juga digunakan dalam menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang. Penelitian ini menggunakan *debt to asset ratio*

sebagai proksi tingkat risiko perusahaan. Penggunaan *debt to asset ratio* dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa pada penelitian Hassan (2009), *debt to asset ratio* yang merupakan proksi tingkat solvabilitas ditemukan berhubungan signifikan dengan tingkat pengungkapan risiko di UAE. *Debt to asset ratio* menggambarkan besarnya hutang perusahaan yang digunakan untuk membiayai aset dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya. Formula yang digunakan dalam menghitung *debt to asset ratio* adalah :

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

3.1.2.4 Tingkat Likuiditas

Tingkat likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. *Current Ratio* (CR) ditentukan sebagai proksi tingkat likuiditas perusahaan dalam penelitian ini. *Current Ratio* (CR) digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendek dengan menggunakan aset lancar perusahaan. Formula yang digunakan dalam menghitung *Current Ratio* (CR) adalah:

$$\text{Current Ratio (CR)} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

3.1.2.5 Keahlian Komite Audit

Keahlian keuangan Komite Audit diukur berdasarkan rasio anggota yang memiliki keahlian keuangan yaitu latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan keuangan. Pengukuran latar belakang pendidikan berdasarkan Keputusan

BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004, yaitu minimal salah seorang anggota Komite Audit adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan. Latar belakang pendidikan dapat berasal dari lulusan fakultas ekonomika dan bisnis bergelar sarjana muda, sarjana, magister, dan doctor dari universitas dalam negeri maupun luar negeri atau pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan non formal yang berkaitan dengan keahlian keuangan dan administrasi bisnis.

Keahlian Komite Audit = _____

3.1.2.6 Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Frekuensi Pertemuan Komite Audit dilihat pada seberapa banyak jumlah pertemuan yang diadakan dalam satu tahun. Komite Audit yang mengadakan pertemuan rutin dapat mengurangi masalah dalam pelaporan keuangan (Yatim, 2009). FCGI (2002) menyatakan bahwa Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan.

Frekuensi Pertemuan (FREK) = Jumlah Rapat Komite Audit dalam Satu Tahun

3.1.2.7 Struktur Kepemilikan Publik

Struktur kepemilikan saham publik mengindikasikan bahwa kepentingan perusahaan tidak hanya ada pada manajerial perusahaan tetapi secara luas ada di tangan publik. Tipe kepemilikan saham publik adalah perbandingan jumlah pemegang saham publik dengan yang dimiliki perusahaan (Sudarmadji dan

Sularto, 2007). Formula yang digunakan dalam menghitung struktur kepemilikan publik adalah:

Struktur Kepemilikan Saham Publik = _____

3.1.2.8 Jenis Kepemilikan Perusahaan

Jenis kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap perusahaan karena mencerminkan proporsi kekuasaan dan kepemilikan perusahaan. Dalam penelitian ini jenis kepemilikan dibagi menjadi kepemilikan PMDN, kepemilikan pemerintah (BUMN), kepemilikan asing (PMA), dan kepemilikan keluarga. Pengelompokan dari jenis kepemilikan perusahaan ini menggunakan analisis sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi struktur kepemilikan menjadi 4 klasifikasi, yaitu: kepemilikan Penanam Modal dalam Negeri (PMDN); kepemilikan pemerintah (BUMN); kepemilikan asing (PMA); kepemilikan keluarga. Struktur kepemilikan diidentifikasi dengan melihat ICMD perusahaan sampel pada bagian *company status*.

2. Struktur kepemilikan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) adalah kepemilikan yang kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Negeri, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di

wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

3. Struktur kepemilikan asing diberikan kepada perusahaan dengan *company status* PMA atau Penanaman Modal Asing. PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal. Penanam Modal Asing dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

4. Status kepemilikan pemerintah diberikan berdasarkan UU No 19 tahun 2003, yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya dijelaskan pada butir ke 2 bahwa Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara

Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Jadi, dalam struktur kepemilikan pemerintah (BUMN) paling sedikit 51% saham perusahaan dimiliki oleh pemerintah.

5. Struktur kepemilikan keluarga merupakan struktur kepemilikan dengan persentase kepemilikan saham oleh individu atau keluarga sebagai pemegang saham utama. Menurut Chakrabarty (2009) perusahaan keluarga bisa dikatakan sebagai *controlling shareholders* jika mempunyai minimal 20% dari saham perusahaan dan mempunyai persentase saham tertinggi dibanding pemegang saham lain (Putri, 2012).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2011. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan pengelola sumber daya yang melakukan kegiatan transaksi ekonomi dengan banyak pihak yaitu *stakeholder* (pemasok, kreditur, konsumen dan investor). Perusahaan yang aktivitas ekonominya berhubungan dengan banyak pihak akan menimbulkan banyak risiko sehingga diharapkan berhubungan dengan pengungkapan risiko yang dilakukan oleh perusahaan. Sampel yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu mengambil sampel yang berdasarkan ketersediaan informasi dan kesesuaian kriteria atau memiliki item-item pengungkapan risiko perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria populasi sebagai berikut:

1. Sampel yang dipilih adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011.
2. Sampel yang dipilih adalah perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan tahun 2009-2011 secara lengkap.
3. Sampel yang dipilih adalah perusahaan yang memiliki rasio NPM (*Net Profit Margin*) positif.
4. Sampel yang dipilih adalah perusahaan yang mengungkapkan frekuensi rapat komite audit dan latar belakang pendidikan komite audit.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan untuk tahun 2009-2011. Penggunaan sampel laporan tahunan tahun tersebut memiliki tujuan mengetahui pengungkapan risiko yang dibuat perusahaan setelah krisis finansial global 2008. Di samping itu, tahun tersebut dipilih karena menggambarkan profil perusahaan terkini. Data mengenai pengungkapan risiko dan variabel kepemilikan saham publik, jenis kepemilikan perusahaan, keahlian komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit diperoleh dalam bagian naratif dari laporan tahunan seperti Laporan Direksi, *Management Analysis and Discussion* (MD&A), Laporan *Corporate Governance*, dan Tinjauan Operasi. Selanjutnya, dalam bagian kuantitatif, dapat ditemukan data mengenai ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, dan tingkat solvabilitas. Data-data tersebut diperoleh dari: situs BEI yaitu www.idx.co.id dan Pojok BEI UNDIP.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan penelusuran data sekunder melalui metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan tahunan dan melihat *summary of financial statement* pada ICMD (*Indonesian Capital Market Directory*) perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3.5 Metode Analisis

Pada bagian ini akan dijelaskan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, dan Uji Hipotesis.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan (Nurgiyantoro *et al.*, 2004). Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mean, standar deviasi, maksimum dan minimum.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini menggunakan 4 pengujian yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen dalam model tersebut terdistribusi secara normal (Ghozali, 2006). Analisis statistik dilakukan dengan melihat hasil *One Sample Kolmogorov Smirnov*, jika di atas tingkat signifikansi 0.05 maka menunjukkan pola distribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya (Ghozali, 2006). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (homoskedastisitas) atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat grafik

scatterplots. Apabila dari grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak (tanpa pola yang jelas) serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2006). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pada penelitian ini, alat analisis yang digunakan dalam menguji autokorelasi adalah uji Durbin-Watson.

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Metode analisis yang digunakan untuk menilai variabilitas luas pengungkapan risiko dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu ukuran perusahaan, rasio keuangan perusahaan (tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas), dan *corporate governance* (kepemilikan saham publik, jenis kepemilikan perusahaan, keahlian komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit) terhadap variabel dependen luas pengungkapan risiko perusahaan. Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$= + \text{SIZE} + \text{NPM} + \text{LEV} + \text{CR} + \text{KEAHLIAN} + \text{FREK} + \text{PUBLIK} + \text{JENIS} +$$

Keterangan:

: Indeks Pengungkapan Risiko Perusahaan

: *intercept*

SIZE : Ukuran Perusahaan (Total Aset)

NPM : Tingkat Profitabilitas (NPM)

LEV : Tingkat Solvabilitas (DTA)

CR : Tingkat Likuiditas (CR)

KEAHLIAN: Keahlian Komite Audit

FREK : Frekuensi Pertemuan Komite Audit

PUBLIK : Struktur Kepemilikan Publik

JENIS : Jenis Kepemilikan Perusahaan

: *error term*

3.5.4 Uji Hipotesis

Dalam bagian ini dijelaskan cara pengujian hipotesis yaitu uji hipotesis yang menggunakan 3 pengujian yaitu Uji Koefisien Determinasi (), Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F), dan Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t).

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi ()

Koefisien Determinasi (R) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

Nilai R adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai R mendekati 0 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik f digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengambilan keputusannya adalah apabila nilai probabilitas signifikansi 0.05, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengambilan keputusannya adalah apabila nilai probabilitas signifikansi 0.05 maka suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.